

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan sering dikaitkan dalam perkembangan ekonomi suatu negara dengan tujuan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa, dalam berbagai kegiatan pembangunan maka berbagai sektor harus secara seiring dan berimbang demi mencapai suatu pembangunan yang merata disetiap daerah yang pada akhirnya akan mempercepat pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi merupakan usaha untuk mengubah suatu perekonomian yang kurang maju, sangat tradisional dan berpendapatan rendah menjadi suatu perekonomian yang modern yang mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi. Sukirno (2012) pembangunan ekonomi hanya akan tercapai apabila pendapatan perkapita masyarakat terus menerus bertambah secara cepat dalam jangka yang cukup panjang.

Peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkatkan keselarasan dan kesinambungan dengan pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dinyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional. Pemberian wewenang ini diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat daerah.

Pelaksanaan dalam upaya mempercepat pembangunan suatu daerah maka pemerintah pusat memberlakukan hak otonomi pada pemerintah daerah untuk menggali potensi yang sebesar-besarnya dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Kegiatan pembangunan nasional tidak lepas dari peran serta pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing sebagai upaya memperbesar kemampuan daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber yang ada dan bersama mengambil inisiatif pembangunan daerah, oleh karena itu pemerintah beserta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya–sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam dan mengembangkan sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, dan keterampilan, dengan bimbingan serta bantuan dari pemerintah.

Diberlakukannya UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004, secara umum menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi

dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin sehingga pendapatan asli daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dari pendapatan keuangan daerah. Pengelolaan PAD yang baik adalah pengelolaan PAD yang mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan, seiring dengan perkembangan perekonomian tanpa mengurangi alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan, dengan adanya pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan peluang pada pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya secara efektif, oleh sebab itu setiap pemerintah daerah berupaya untuk dapat meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, daerah menjadi lebih mandiri, ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak milik daerah, dalam otonomi daerah sumber-sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah merupakan salah satu tolak ukur yang nyata dinamis, serasi dan bertanggungjawab. Pada umumnya suatu daerah dikatakan siap untuk melakukan otonomi daerah apabila pendapatan asli daerahnya dapat memberikan sumbangan terhadap anggaran

pendapatan belanja daerah. Sumber utama pembangunan daerah harus dapat dibiayai dari pendapatan asli sehingga daerah tidak bergantung dari subsidi pemerintah pusat, oleh sebab itu dengan diberlakukannya desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal serta akan memacu kreativitas pemerintah daerah, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan teratasi.

**Tabel 1.1**  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta  
Tahun 2013-2015 (ribu rupiah)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Kulon Progo	95.991.513	158.623.927	187.802.917
2	Bantul	224.197.863	357.411.064	312.419.914
3	Gunung kidul	83.427.448	159.304.338	145.856.403
4	Sleman	449.270.306	573.337.600	577.588.009
5	Yogyakarta	383.052.140	470.634.762	449.849.108
	Jumlah	1.235.939.270	1.719.311.691	1.673.516.351

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah 2016).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan disetiap Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Dari lima Kabupaten tersebut yang memiliki kontribusi terbesar tahun 2015 yakni Kabupaten Sleman sebesar Rp577.588.009 ribu, kemudian diikuti oleh Kota Yogyakarta sebesar Rp449.849.108 ribu. Bila dilihat dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/ Kota tersebut, maka PAD di Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun terus meningkat hingga di tahun 2015 jumlah penerimaan PAD di seluruh Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai Rp16.673.516.351 ribu.

Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu Negara, terutama pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada, menurut UU Kepariwisata No. 9 Tahun 1990. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud tidak untuk mencari nafkah ditempat yang dikunjungi tapi hanya semata untuk menikmati perjalanan tersebut untuk mencapai kepuasan.

Jumlah kunjungan wisatawan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan penerimaan daerah, baik dari kunjungan domestik maupun mancanegara. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi wisata yang berlimpah dan bervariasi. Terdapat berbagai jenis obyek wisata di Kota ini, seperti wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata pendidikan, selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta yang relatif aman dan nyaman dengan keramah-tamahan masyarakatnya menjadikan Yogyakarta menjadi tujuan wisatawan serta memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

**TABEL 1.2**  
Laju Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke DIY  
Tahun 2010-2015

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
2010	415.204	7.855.784	8.270.988
2011	461.162	8.839.624	9.300.786
2012	499.515	10.880.125	11.379.640
2013	647.984	12.194.311	12.842.295
2014	572.617	16.201.618	16.774.235
2015	740.409	18.281.909	19.022.318

Sumber : Dinas Pariwisata DIY, (data diolah 2016)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan disetiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2010 sebesar 415.204 orang sampai tahun 2013 selalu mengalami peningkatan sebesar 647.984 orang, akan tetapi penurunan terjadi pada tahun 2014 sebesar 572.617 orang kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 740.409 orang, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2010 sebesar 7.855.784 orang meningkat menjadi 18.281.909 orang pada tahun 2015.

Selain jumlah kunjungan wisatawan, indikator lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah Jumlah Penduduk. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan antar daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang dibutuhkan, dan bukan satu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor inilah yang akan menjadi

salah satu unsur penting pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah demi kemakmuran masyarakat. Pada sisi lain penduduk juga dapat dipotensikan juga sebagai subyek pembangunan yang tidak hanya menikmati tetapi juga berperan aktif, oleh karena itu penduduk dipandang sebagai sentral dalam pembangunan suatu wilayah, hal ini akan meningkatkan tingkat produksi yang dihasilkan suatu daerah dengan adanya konsumen yang akan membeli dan mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Konsumsi dari penduduk inilah yang akan menimbulkan permintaan agregat. Jadi perkembangan ekonomi suatu wilayah akan ditentukan oleh adanya permintaan yang datang dari penduduk. Jumlah penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja memungkinkan suatu wilayah akan menambah produksinya.

**Tabel 1.3**  
 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Daerah Istimewa  
 Yogyakarta  
 Tahun 2010-2015 (juta jiwa)

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah L+P (juta jiwa)
1	2010	1 710,9	1 756,5	3 467,4
2	2011	1 732,6	1 777,3	3 509,9
3	2012	1 754,2	1 798,1	3 552,4
4	2013	1 775,8	1 818,9	3 594,8
5	2014	1 839,7	1 839,7	3 637,1
6	2015	1 824,7	1 866,4	3 691,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah 2016).

Berdasarkan tabel 1.3 jumlah penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 3.467,4 juta jiwa, selanjutnya pada tahun 2011 mengalami

kenaikan sebesar 3.509,9 jiwa, pada tahun 2012 jumlahnya sebesar 3.552,4 juta jiwa, dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 3.594,8 juta jiwa, pada tahun 2014 mengalami kenaikan jumlah penduduk sebesar 3.637,1 juta jiwa, kemudian ditahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 3.691,1 juta jiwa, selain jumlah penduduk, keberhasilan pembangunan perekonomian suatu wilayah dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator lain dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu daerah yaitu melalui pertumbuhan ekonomi secara agregat yang dihitung melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didefinisikan sebagai penjumlahan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah atau wilayah tersebut dalam periode tertentu. PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas dasar berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga tahun berjalan. Nilai PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah dan pergeseran struktur perekonomian daerah, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan perkembangan riil perekonomian secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan melalui laju pertumbuhan ekonomi.

Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah.



**Tabel 1.4**  
Laju Pertumbuhan PDRB di Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Dasar Harga  
Konstan  
Tahun 2013-2015 (Persen)

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Kulonprogo	15,56	15,60	15,65
2	Bantul	16,46	16,51	16,56
3	Gunungkidul	16,13	16,18	16,22
4	Sleman	17,04	17,10	17,15
5	Yogyakarta	16,82	16,87	16,92

Sumber: Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (data diolah 2016).

Tabel 1.4 menunjukkan PDRB di lima kabupaten Daerah istimewa Yogyakarta meningkat disetiap tahunnya meskipun tidak terlalu besar, dari lima kabupaten laju pertumbuhan terbesar berada di Kabupaten Sleman dengan laju pertumbuhan tahun 2013 sebesar 17,04 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 17,10 persen peningkatan terakhir pada tahun 2015 sebesar 17,15 persen, kemudian disusul oleh Kota Yogyakarta dengan laju pertumbuhan di tahun 2015 sebesar 16,92 persen. Bila dilihat dari keseluruhan PDRB di Kabupaten/ Kota tersebut, maka PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahun terus meningkat hingga tahun 2015.

Alasan peneliti memilih seluruh Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitian dikarenakan kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki berbagai macam budaya baik dari kawasan wisata, maupun sumber daya alam yang dapat mendukung sektor industri dan perdagangan sebagai salah satu prioritas pembangunan penggerak ekonomi masyarakat, sehingga berpotensi menghasilkan

penerimaan daerah yang cukup besar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu setiap tahunnya Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidaklah sama di masing-masing daerah kabupaten atau kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto berhubungan positif dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mendorong dilakukannya penelitian serta mengkaji lebih dalam tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2015)”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah. Maka penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa faktor terpenting saja yang dianggap berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah, yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto. Data yang di gunakan adalah data tahunan yaitu pada periode tahun 2009-2015 Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **C. Rumusan Masalah penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Jumlah Kunjungan Wisatawan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
4. Apakah variabel Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto secara bersama-sama berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui:

1. Menganalisis bagaimana pengaruh faktor Jumlah Kunjungan Wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Menganalisis bagaimana pengaruh faktor Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis bagaimana pengaruh faktor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis dan pembaca,  
Hasil penelitian ini merupakan kesempatan bagi penulis dan pembaca untuk dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dibidang ekonomi khususnya mengenai Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya,  
Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah intelektualitas dan aktualitas diri serta sebagai referensi atau acuan bagi studi tentang Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto atau objek penelitian sejenis.
3. Bagi masyarakat,  
Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti bagi masyarakat luas mengenai kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bagi pemerintah terkait,  
Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan acuan pengambilan kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah

dalam upaya mendorong perekonomian daerah sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang adil dan makmur.